

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan seringkali dipahami dengan indikasi pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, sebaliknya kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang bersifat kompleks serta multidimensi. Disisi lain, tingkat kehidupan yang rendah juga seringkali menjadi tolak ukur pada kemiskinan, akan tetapi tingkat kehidupan yang rendah menjadi salah satu mata rantai yang muncul pada lingkaran kemiskinan. Kemiskinan juga dapat dipandang menjadi suatu hal yang absolut dan relatif. Sehingga kemiskinan merupakan salah satu masalah ketidakmampuan dari seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar yang standarnya di atas aspek kehidupan (Ismuningsih, 2010).

Kemiskinan berhubungan dengan tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mampu untuk bersekolah, tidak mampu berobat ke dokter ketika sakit dan tidak mengerti tentang baca maupun tulis. Kemiskinan juga diartikan sebagai pengangguran yang tidak mempunyai suatu pekerjaan sehingga hal itu menyebabkan rasa takut untuk menatap masa depan hidupnya, sulitnya akses untuk memperoleh sumber air bersih. Kemiskinan merupakan ketidakberdayaan serta kurangnya kebebasan untuk hidupnya. Sehingga kemiskinan juga diartikan suatu kekurangan, dimana seringkali diukur dengan tingkat kesejahteraan dari seseorang (Istifaiyah, 2015).

Menurut Emil, Salim (1980: 41) secara spesifik pengertian dari kemiskinan yaitu: “*memandang kemiskinan yang digambarkan sebagai rendahnya tingkat pendapatan yang digunakan sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari*”. Kebutuhan sehari-hari yang dimaksud seperti kebutuhan pokok yang mendasar, misalnya kesehatan, kehidupan yang layak, memiliki sifat yang saling menghargai antar sesama, kehormatan yang didapatkan layaknya orang lain dan kebebasan untuk lingkungan bermasyarakat. Kebutuhan manusia berbagai macam, yang bersifat multidimensi, dalam aspek kemiskinan jika dilihat dengan segi *public policy* terdapat 2 aspek terdiri dari:

1. Aspek kemiskinan primer, misalnya seperti miskinnya asset, keterampilan, wawasan, dan keorganisasian bidang sosial maupun politik.
2. Aspek kemiskinan sekunder, misalnya seperti miskinnya jaringan sosial, informasi, dan keuangan.

Masalah kemiskinan masih menjadi persoalan primer untuk seluruh dunia khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Maka dari itu diperlukannya bagi pemerintah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suatu kemiskinan. Berikut merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan di Indonesia (Mardimin, 1996):

- a. Negara Indonesia mempunyai kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah, sehingga sumber daya manusia yang kita miliki kalah saing dengan sumber daya manusia yang ada di luar negeri, hal tersebut mengakibatkan banyaknya substansi-substansi lebih memilih untuk melakukan impor tenaga kerja dibandingkan harus menggunakan tenaga kerja sendiri walaupun

dengan kualitas yang rendah. Indikator dari rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dengan tingkat pendidikan yang dimiliki.

- b. Kurang akuratnya suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk upaya penanggulangan kemiskinan sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sekarang.
- c. Pemerintah Daerah kurang memperhatikan dalam pengembangan potensi daerah yang dimiliki, sehingga dapat menyebabkan rendahnya kualitas potensi fisik dan infrastruktur wilayah hingga memperlambat suatu aktivitas ekonomi daerah.

Berdasarkan kondisi kemiskinan mempunyai 4 bentuk. Berikut keempat bentuk kemiskinan tersebut yaitu (Sumarsono, 2003):

- a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan salah satu kondisi dimana seseorang mempunyai pendapatan di bawah garis kemiskinan maka akan menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang meliputi sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan pada keadaan tertentu maka seseorang tidak dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Garis kemiskinan menjadi konsumsi rata-rata yang ditujukan untuk kebutuhan pokok dan berhubungan dengan pemenuhan suatu standar kesejahteraan hidup masyarakat. Pada konsep untuk menentukan maupun menggambarkan suatu kriteria seseorang atau sekelompok dalam golongan miskin maka termasuk kemiskinan absolut ini.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai salah satu dari bentuk kemiskinan dimana terjadi karena adanya suatu ketimpangan pada masyarakat yang meliputi ketimpangan standar kesejahteraan atau ketimpangan pendapatan penyebabnya dari pengaruh kebijakan-kebijakan pembanguna daerah yang belum menyeluruh di semua lapisan masyarakat. Pada daerah tertinggal termasuk dalam kategori sebagai daerah yang umumnya belum mencakupi suatu program pembangunan sehingga masyarakat tergolong memiliki tingkat pendapatan yang rendah dan pengeluaran yang lebih banyak daripada pendapatan yang diterima maka akan terjadi adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural menjadi salah satu bentuk dari kemiskinan yang seringkali terjadi karena masyarakat umumnya mempunyai perilaku atau kebiasaan yang tidak ingin merubah taraf hidupnya secara modern akan tetapi hanya berpegang pada suatu kondisi atau adat-istiadat yang sudah berlaku sejak lama pada lingkungan masyarakat tersebut. Kebiasaan yang seperti itu dapat menimbulkan seseorang berperilaku seperti boros belanja suatu hal yang tidak begitu dibutuhkan, kurangnya sikap kreatifitas, adanya sikap malas pada semua hal, serta sikap yang tidak mampu untuk hidup mandiri atau selalu bergantung pada orang lain.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan bagian dari bentuk kemiskinan dimana disebabkan oleh akses pada sumber daya yang belum memadai dan pada

umumnya terjadi suatu tatanan sosial, politik maupun budaya yang kurang mendukung untuk upaya pengentasan kemiskinan. Sehingga terdapat unsur diskriminatif pada bentuk kemiskinan struktural ini. Dalam penjelasan ilmu sosial, salah satu bentuk kemiskinan seperti ini memang cukup sering kita temui.

Kemiskinan struktural ini sering menimbulkan berbagai macam bentuk kemiskinan. Berdasarkan sifatnya kemiskinan struktural dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk karena adanya tanah yang tidak subur hingga terjadi kelangkaan pada sumber daya alam di daerah tersebut. Kemiskinan alamiah juga dapat menyebabkan daerah-daerah tertentu menjadi tidak terjangkau dari pembangunan yang dilakukan. Pada daerah tertinggal termasuk kategori sebagai daerah yang umumnya kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum menyeluruh.

2) Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan merupakan kemiskinan yang terjadi di masyarakat tidak memiliki suatu kesempatan untuk merasakan fasilitas, sarana dan sumber daya ekonomi secara merata dan menyeluruh yang disebabkan oleh pembangunan. Kemiskinan buatan yang seperti ini menjadi dampak negatif dalam melakukan pelaksanaan konsep pembangunan. Kebanyakan kemiskinan buatan ini dilaksanakan pada berbagai negara berkembang. Membuat suatu target pertumbuhan ekonomi secara progresif yang menyebabkan pembangunan tidak merata dimana digambarkan dengan tidak menyeluruhnya pembagian hasil

pembangunan dari masing-masing sektor seperti pada sektor pertanian mempunyai tingkat keuntungan yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan sektor industri yang mempunyai tingkat keuntungan yang lebih besar. Sehingga diperlukannya suatu upaya bagi pemerintah untuk pemerataan pada pembangunan di setiap daerah.

Terdapat tiga aspek kemiskinan yang perlu diketahui, yaitu (Kuncoro, 1997):

Pertama, kemiskinan multidimensi merupakan kemiskinan yang mempunyai banyak aspek apabila dilihat dari segi kebutuhan manusia yang berbagai macam bentuknya. Dalam kebijakan umum kemiskinan dibagi menjadi dua aspek yaitu aspek primer yang miskin akan pengetahuan, keterampilan yang dimiliki, serta aset-aset yang dipunyai, sedangkan aspek sekunder yang miskin pada sumber-sumber penghasilan, informasi serta jaringan sosial. Kemiskinan ini terjadi adanya kekurangan gizi, air dan pendidikan yang kurang memadai dan menyeluruh, akses kesehatan yang dimiliki masih sulit serta pemukiman yang tidak sehat.

Kedua, aspek kemiskinan ini saling berhubungan antar satu sama lain yang secara langsung maupun tidak langsung sehingga jika terjadi kemajuan untuk suatu aspek dapat mempengaruhi aspek lainnya begitupun sebaliknya.

Ketiga, bahwa yang miskin yaitu manusia itu sendiri baik dalam segi individual maupun kolektif. Waktu yang dimiliki mereka tersita untuk mencari suatu penghasilan karena tingkat pendidikan yang rendah sehingga keadaan memaksa mereka untuk mencari kehidupan yang lebih layak.

2. Ukuran Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan dari seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya atau yang disebut *basic need approach*. Dengan pendekatan ini kemiskinan jika pengukurannya dari segi pengeluaran didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang meliputi sandang, pangan serta papan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan (GK). Jadi perhitungan penduduk miskin dilakukan pada daerah perdesaan dan daerah perkotaan.

Penetapan perhitungan dari garis kemiskinan pada masyarakat yaitu apabila masyarakat memiliki suatu penghasilan yang di bawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan dari perhitungan jumlah tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup berbagai kebutuhan makan maupun non makan. Pengukuran untuk kebutuhan dari minimum makanan yang akan dikonsumsi per hari dapat dipatok sebesar 2.100 kilokalori per kapital per hari. Sedangkan untuk kebutuhan dari minimum non makanan yang meliputi kesehatan, pendidikan dan perumahan. Sehingga kebutuhan dasar diwakili oleh 47 jenis komoditi di daerah perdesaan dan 51 jenis komoditi di daerah perkotaan (Saragih, 2014:143).

Sedangkan menurut World Bank, standar dari pengukuran kemiskinan ditetapkan berdasarkan pendapatan per kapital. Penduduk yang termasuk golongan miskin merupakan penduduk yang mempunyai pendapatan per kapital kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan per japital nasional. Dalam konteks

tersebut, maka dapat disimpulkan ukuran kemiskinan menurut World Bank yaitu sebesar \$2 per orang per hari (Kadji, 2009).

Perhitungan indikator kemiskinan menurut Foster Greer Thorbecke 1984 dalam (Fatony, 2011) yaitu suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan, pengukuran tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$$

Dimana:

a : 0,1,2

z : Garis Kemiskinan

y_i : Rata-rata pengeluaran per capital yang digunakan dalam waktu sebulan untuk penduduk yang berada dalam Garis Kemiskinan (***i*** = 1,2,...,q), ***y_i*** < ***z***

q : Banyaknya jumlah penduduk dalam yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK)

n : Jumlah penduduk

Jika $a = 0$, maka diperoleh Head count Index (P0), jika $a = 1$, maka diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) serta apabila $a = 2$ maka disebut dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severty Indeks-P2*).

3. Penyebab Kemiskinan

Tidak sedikit penjelasan mengenai apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan, misalkan saja kemiskinan yang terjadi di berbagai negara berkembang itu disebabkan karena negara tersebut baru saja merasakan merdeka

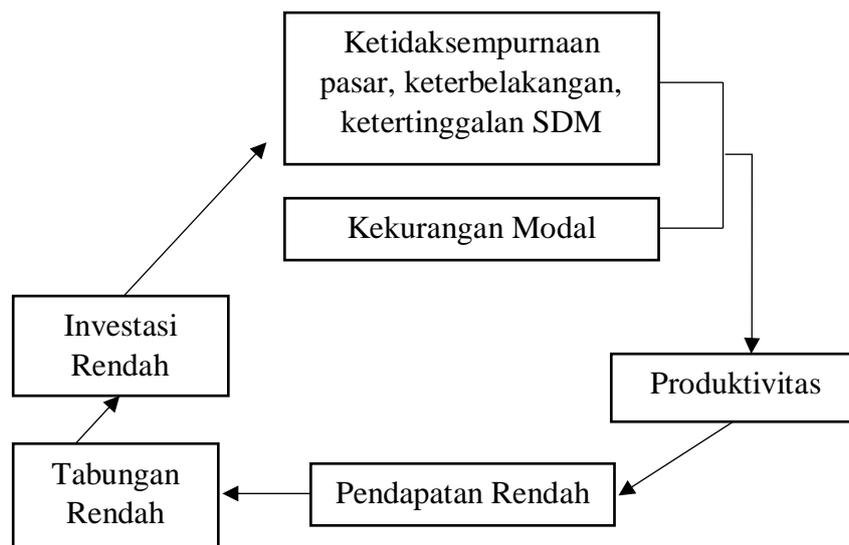
setelah mengalami perang dunia II sehingga perekonomian dari negara tersebut belum stabil itulah yang menjadi akar permasalahan dari kemiskinan (Kuncoro, 1997).

Menurut (Kuncoro, 1997), banyaknya jumlah penduduk di negara miskin disebabkan karena penduduk negara tersebut hanya menggantungkan diri pada mata pencaharian sektor pertanian dimana pada dasarnya sistem produksi yang digunakan masih berupa cara tradisional dan mayoritas dari masyarakat sering berperilaku apatis terhadap lingkungan.

Mengidentifikasi penyebab kemiskinan dilihat dari sisi ekonomi. *Pertama*, dilihat secara mikro yaitu kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan pada pola kepemilikan dari sumber daya sehingga hal itu menyebabkan terjadinya suatu ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, dalam hal tersebut penduduk miskin mempunyai sumber daya yang begitu terbatas serta kualitas yang dimiliki rendah apabila dibandingkan dengan penduduk yang kaya hasilnya berbanding terbalik yaitu sumber daya yang dimiliki baik dari jumlah serta kualitasnya, dimana penduduk yang termasuk kategori kaya yaitu memiliki sumber daya yang berkualitas tinggi dan jumlahnya banyak. *Kedua*, kemiskinan terjadi akibat adanya perbedaan dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dimana menyebabkan tingkat produktivitasnya rendah sehingga mereka juga mendapatkan upah yang rendah, penyebab dari kualitas sumber daya yang rendah ini dikarenakan adanya diskriminasi, rendahnya tingkat pendidikan, nasib yang kurang beruntung atau berasal dari keluarga yang tidak mampu. *Ketiga*, kemiskinan muncul karena adanya perbedaan akses dalam modal, seseorang

tersebut apakah mendapatkan akses yang mudah untuk mencari modal atau mengalami kesulitan untuk akses mencari modal (Sukmaraga, 2011).

Ketiga penyebab mengenai kemiskinan di atas bermuara pada teori lingkaran setan (*vicious circle of poverty*), dimana disebabkan adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal yang dapat menyebabkan tingkat produktivitas rendah serta keterbelakangan. Jika tingkat produktivitas rendah, maka mengakibatkan tingkat pendapatan yang diterima juga rendah (Sukmaraga, 2011).



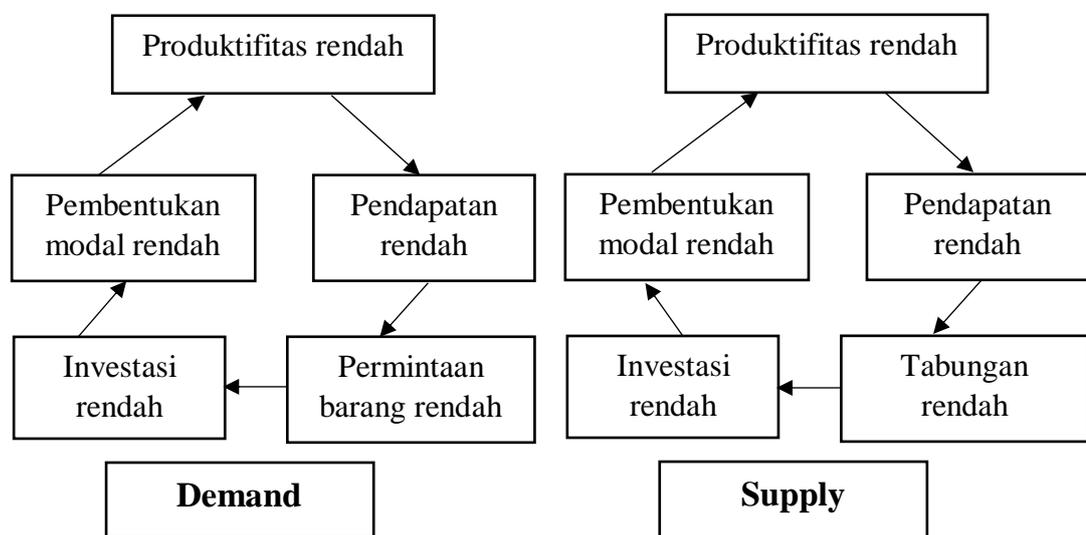
Sumber: Kuncoro, 1997

Gambar 2. 1 Lingkaran Kemiskinan

Berdasarkan gambar 2.1 di atas, jika tingkat pendapatan rendah maka akan menimbulkan tingkat tabungan/investasi rendah. Dampak dari rendahnya tingkat investasi akan mengakibatkan kekurangan modal, keterbelakangan, produktivitas rendah dan sebagainya. Di negara-negara miskin tidak mungkin dilakukan adanya pertumbuhan ekonomi yang secara signifikan sehingga akan berdampak buruk

bagi negara yang masyarakatnya akan terjat dalam lingkaran kemiskinan (Kuncoro, 1997).

Pada setiap daerah memiliki kewenangan dalam mengembangkan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dipunyai, akan tetapi disisi lain harus disertai tenaga kerja dimana memiliki kemampuan yang mahir sehingga hal tersebut dapat dilakukan untuk berbagai macam jenis pekerjaan. Di negara berkembang, Sumber Daya Alam yang begitu melimpah belum tentu mampu dikembangkan karena pada mayoritas penduduknya rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah, oleh sebab itu tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengolah kekayaan sumber daya alam masih terbatas serta modal yang dimiliki oleh negara berkembang dalam memanfaatkan sumber daya alam saat ini masih sangat minim (Saragih, 2014).



Gambar 2. 2 Lingkaran Kemiskinan tak Berujung pangkal oleh Nurkse

Menurut pandangan Nurkse terdapat 2 hal yang dapat membuat seseorang masuk kedalam lingkaran kemiskinan yang tidak berujung pangkal tersebut yaitu

pertama, pada sisi permintaan (*Demand*), terjadi apabila suatu negara miskin disebabkan karena penanaman modal yang begitu kurang sehingga berakibat terbatasnya pasar membuat pembagian barang menjadi terbatas. Apabila terjadi terus menerus maka akan menyebabkan tingkat pendapatan renda dimana tingkat produktivitas mengalami penurunan hingga pada akhirnya menimbulkan keinginan untuk menanam modal menjadi berkurang secara drastis. *Kedua*, pada sisi penawaran (*Supply*), terjadi apabila dari tingkat pendapatan yang diperoleh penduduk rendah maka akan berdampak pada tingkat produktivitas menjadi rendah, sehingga keinginan untuk berinvestasi dan menabung juga akan rendah. Hal tersebut berakibat menjadi berkurangnya modal dan seterusnya akan begitu pada perekonomian berputar tiada ujung.

Ada beberapa pendapat dari para ahli yang mengemukakan mengenai penyebab kemiskinan itu terjadi di masyarakat, terdapat 2 macam teori yang dipergunakan untuk para ahli menjelaskan akar dari kemiskinan yaitu teori marginalisasi dan teori ketergantungan. Pada teori marginalisasi merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh ketergantungan, tabiat apatis, konsumtif, pemborosan, rendah hati dan kurangnya memiliki jiwa wiraswasta (Kadji, 2009).

4. Indikator-indikator Kemiskinan

Ada beberapa indikator kemiskinan sebagaimana dikutip dari BPS (Badan Pusat Statistik) sebagai berikut:

- 1) Ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan.

- 2) Tidak memiliki biaya untuk mencukupi kebutuhan pokok lainnya seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, sanitasi, dan air bersih.
- 3) Tidak memiliki jaminan untuk kehidupan di masa depan, disebabkan tidak memiliki investasi untuk pendidikan dan keluarga.
- 4) Tingkat kualitas sumber daya manusia begitu rendah dan sumber daya alam yang tersedia juga terbatas sehingga mengakibatkan kebutuhan untuk sehari-hari menjadi tidak terpenuhi.
- 5) Kegiatan sosial masyarakat yang dilakukan kurang membangun dan berpartisipasi.
- 6) Sulitnya mendapat akses untuk mencari suatu pekerjaan dengan penghasilan tetap.
- 7) Faktor-faktor seperti modal dan cacat fisik maupun mental menjadi sebuah indikator kemiskinan sehingga seseorang menjadi tidak mempunyai keinginan berusaha.
- 8) Ketidakmampuan sosial dan ketidaktergantungan seperti tidak sekolah, tidak mempunyai tempat tinggal, kelompok terpendek, menjadi korban kekerasan rumah tangga, wanita menjadi tulang punggung keluarga dan lainnya.

5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah salah satu yang menjadi nilai bersih dari barang maupun jasa-jasa akhir yang akan dihasilkan oleh berbagai macam kegiatan ekonomi pada suatu daerah untuk periode tertentu (Hadi dan Sasana, 2016). PDRB dapat menunjukkan kemampuan pada suatu daerah untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki, maka dari itu besarnya PDRB yang dihasilkan untuk

setiap daerah sangat bergantung pada potensi SDA yang dimiliki dan faktor produksi dari daerah tersebut. Sehingga keterbatasan yang dimiliki untuk penyediaan faktor-faktor tersebut sangat berdampak pada besarnya PDRB yang berbeda antar daerah (Adhi, 2011).

Pada pendekatan PDRB yang digunakan untuk menghitung angka-angka yang dihasilkan dari berbagai wilayah yaitu: *Pertama*, pendekatan produksi. *Kedua*, pendekatan pengeluaran. *Ketiga*, pendekatan pendapatan. Pendekatan produksi merupakan nilai dari keseluruhan yang didapatkan dengan nilai tambah barang serta jasa dari hasil seluruh unit produksi pada sektor suatu daerah dalam kurun waktu tertentu (umumnya diambil dalam waktu satu tahun). Nilai yang didapatkan pada satu sektor untuk selanjutnya akan dilakukan perincian kembali menjadi subsektor. Ada beberapa pembagian unit produksi untuk sektor lapangan usaha yaitu sebagai berikut:

1. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan.
2. Sektor penggalian dan pertambangan.
3. Sektor industri pengolahan.
4. Air bersih, listrik, dan gas.
5. Konstruksi.
6. Sektor perhotelan, restoran, dan perdagangan.
7. Sektor pengangkutan dan komunikasi.
8. Sektor jasa keuangan, perusahaan, dan real estate.
9. Sektor yang mencakup keseluruhan jasa-jasa termasuk jasa pemerintahan dan lain-lain.

Pendekatan pengeluaran yang didapatkan melalui keseluruhan komponen-komponen permintaan akhir yaitu sebagai berikut:

1. Pengeluaran akhir konsumsi pada rumah tangga serta lembaga swasta nirbala (tidak mencari laba).
2. Pengeluaran akhir konsumsi pemerintah.
3. Investasi atau pembentukan modal tetap domestik bruto.
4. Perubahan pada investor
5. Jumlah ekspor neto (ekspor-impor)

Pendekatan pendapatan diperoleh melalui jumlah balas jasa yaitu faktor-faktor produksi terutama bagi faktor produksi yang berpartisipasi dengan proses produk untuk suatu daerah pada periode tertentu (umumnya satu tahun). Maksud dari balas jasa ini dimana faktor produksi merupakan bagian dari upah sewa tanah, upah gaji, bunga modal serta keuntungan kotor dalam suatu perusahaan. Akan tetapi semua yang diperoleh tersebut tidak mencakup dari potongan pajak penghasilan maupun pajak langsung lainnya. Apabila telah terjadi penyusutan serta pajak tidak langsung neto (pajak tidak langsung-subsidi) juga akan mencakup dalam perhitungan PDRB.

Secara konsep yang diperoleh dari hasil ketiga pendekatan di atas yaitu bentuk nilai yang sama. Sehingga jumlah dari pengeluaran akan didapatkan nilai yang sama dengan jumlah dari barang serta jasa akhir produksi, hasilnya akan sama dengan jumlah pendapatan faktor-faktor produksi. Untuk perhitungan Produk Domestik Regional Bruto yang akan dihasilkan sama dengan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar, hal tersebut sudah mencakup

dalam pajak tidak langsung neto (pajak tidak langsung-subsidi). Pada penyusunan PDRB yang berdasarkan BPS dijelaskan dalam 2 konsep yaitu:

1. PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai dari jumlah produksi dan pendapatan serta pengeluaran yang dihitung dengan atas dasar harga tetap. Pada perhitungannya menggunakan tingkat dasar perhitungan dari Indeks Harga Konsumen (IHK), secara riil kemampuan dari suatu wilayah yang diperoleh melalui perhitungan harga konstan sama dengan perhitungan ekonomi.
2. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah dari seluruh sektor yang berada di lingkup perekonomian pada suatu daerah, mencakup nilai produksi, nilai antar seluruh unit yang akan digunakan dalam proses produksi hingga penilaiann komponen PDRB yang lain. Pada perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan seluruh pihak ikut andil dalam sektor ekonomi.

6. Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan, pendidikan adalah suatu usaha terencana dalam mewujudkan suasana belajar serta proses belajar agar peserta didik tersebut dalam mengembangkan potensi dirinya memiliki kecerdasan, kepribadian, pengendalian diri, kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan berbagai keterampilan lainnya yang dibutuhkan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan dari pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan takwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, berilmu, cakap,

kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta mempunyai tanggung jawab.

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan untuk jangka panjang, secara tidak langsung dengan melalui perbaikan secara produktivitas dan efisien umumnya melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang diperlukan guna meningkatkan produktivitas sehingga akan meningkatkan pendapatan mereka juga (Arsyad, 2004).

Pendidikan yang baik untuk setiap orang akan mempunyai bekal ilmu pengetahuan serta keterampilan, sehingga memiliki pilihan untuk mendapatkan pekerjaan yang menjadikan produktif serta dapat meningkatkan pendapatan. Hal ini pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan serta menghilangkan eksklusi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (Ustama, 2009).

Upaya untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan (*sustainable development*), pada sektor pendidikan memiliki peranan agar strategis terutama untuk mendorong akumulasi modal yang dapat mendukung suatu proses produksi serta aktivitas ekonomi yang lain. Secara definisi, seperti yang dinyatakan dalam *World Commission on Environment and Development*, 1997 dalam McKeown (dalam Dian Satria, 2008), *sustainable development* menyatakan bahwa “*Sustainable development is development that meets the needs of the present without comprising the ability of future generations to meet their own needs.*” Sehingga konteks ini, pendidikan menjadi alat untuk mencapai target dalam berkelanjutan, karena pendidikan menjadi aktivitas pembangunan yang dapat

tercapai sehingga peluang dalam meningkatkan kualitas hidup untuk masa depan akan menjadi lebih baik. Namun disisi lain pendidikan juga menjadi usaha pembangunan yang lebih hijau (*greener development*) dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan yang mudah tercapai.

7. Belanja Daerah

Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 tentang belanja daerah adalah kewajiban bagi pemerintah daerah yang diakui sebagai pemegang nilai kekayaan bersih. Menurut (Halim, 2007) belanja daerah merupakan keseluruhan pengeluaran kas daerah untuk mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran tertentu yang bersangkutan tidak akan diperolehnya pembayaran kembali dari pemerintah daerah.

Belanja daerah yang ditetapkan oleh pemerintah dikelompokkan menjadi dua diantaranya yaitu:

- a. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan dan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan serta program. Pada jenis belanja tidak langsung terdiri dari:
 1. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi dengan bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan yang lainnya diberikan kepada pegawai negeri sipil dimana sudah ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan. Misalnya: gaji dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dan sebagainya.
 2. Belanja bunga adalah penganggaran untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) yang

berdasarkan perjanjian dari pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Misalnya: bunga hutang obligasi, bunga hutang pinjaman dan sebagainya.

3. Belanja subsidi adalah penganggaran untuk bantuan biaya produksi terhadap perusahaan/lembaga tertentu supaya harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Misalnya: belanja subsidi perusahaan/lembaga.
4. Belanja hibah adalah penganggaran untuk pemberian hibah dengan bentuk uang dan/atau jasa terhadap pemerintah atau pemerintah daerah yang lainnya serta kelompok masyarakat/perorangan secara spesifik sudah ditetapkan peruntukannya. Misalnya: belanja hibah kepada pemerintah desa, belanja hibah kepada pemerintah daerah, belanja hibah kepada pemerintah pusat dan sebagainya.
5. Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang bersifat tidak secara terus menerus serta selektif untuk bentuk uang atau barang terhadap masyarakat. Misalnya: belanja organisasi kemasyarakatan, belanja parpol.
6. Belanja bagi hasil adalah penganggaran untuk dana bagi hasil yang bersumber melalui pendapatan provinsi terhadap pemerintah daerah serta pemerintah daerah yang lainnya atau berasal dari pemerintah kabupaten/kota terhadap pemerintah desa dan pemerintah daerah yang lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan pada kemampuan keuangan. Misalnya: belanja bagi hasil retribusi daerah

kepada pemerintah desa, belanja bagi hasil pajak daerah kepada provinsi/pemerintah desa dan sebagainya.

7. Belanja bantuan keuangan adalah penganggaran untuk bantuan keuangan yang bersifat umum maupun khusus dari provinsi terhadap kabupaten/kota, pemerintah desa serta pemerintah daerah yang lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota terhadap pemerintah desa dan pemerintah daerah yang lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau untuk peningkatann kemampuan keuangan.
 8. Belanja tidak terduga adalah belanja untuk membiayai adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak terduga serta kejadian-kejadian yang bersifat luar biasa, seperti bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan penanggulangan bencana alam.
- b. Belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung dalam kegiatan SKPD yang kontribusinya kepada pencapaian prestasi kerja yang dapat diukur. Pada jenis belanja langsung terdiri dari:
1. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dengan bentuk gaji serta tunjangan, dan penghasilan yang lainnya diberikan kepada pegawai negeri sipil ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Misalnya: gaji dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dan sebagainya.
 2. Belanja barang dan jasa merupakan belanja untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang dengan nilai yang manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa untuk melaksanakan program serta

kegiatan pemerintah daerah. Misalnya: belanja bahan pakai habis, belanja premi asuransi, belanja jasa kantor dan sebagainya.

3. Belanja modal merupakan belanja untuk pengeluaran yang digunakan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan suatu aset tetap yang berwujud memiliki manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan kegiatan pemerintahan. Misalnya: belanja dalam bentuk jalan, tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

8. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan *general purpose grant* atau *block grants* yaitu dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan sebagai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dengan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka adanya pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi biasanya dihitung berdasarkan jumlah gaji dari Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal daerah adalah kebutuhan dari pendanaan daerah dengan melaksanakan fungsi layanan dasar pada umumnya. Kebutuhan pendanaan daerah dapat diukur melalui jumlah penduduk, indeks kemahalan konstruksi, luas wilayah, indeks pembangunan manusia, dan produk domestik regional bruto per kapita.

Apabila alokasi DAU untuk daerah yang memiliki potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskalnya kecil maka akan mendapatkan alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, apabila daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar, maka akan mendapatkan alokasi DAU yang

relatif besar. Sehingga prinsip ini dapat menegaskan fungsi dari DAU sebagai faktor untuk pemerataan kapasitas fiskal (Dikko, 2011).

Pada pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah kabupaten/kota akan diperuntukkan dalam pemerataan kemampuan keuangan untuk mendanai pada setiap kebutuhan daerah di kabupaten/kota sebagai rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengelolaan DAU ini diperlukan perhatian tentang sejauh mana aspirasi dari masyarakat untuk menyerap adanya mekanisme pengelolaan yang tepat serta transparan. Pada kebijakan umum untuk pengelolaan keuangan daerah, akan dikelola berdasarkan dari pendekatan kinerja yaitu pengelolaan anggaran yang mengutamakan suatu pencapaian out come melalui alokasi biaya atau input yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan bagaimana kondisi pada seluruh komponen keuangan (Leode, 2009).

B. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan PDRB dengan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat yaitu salah satunya meningkatkan PDRB tanpa harus memandang apakah kenaikannya lebih tinggi atau menurun, pertumbuhan ekonomi juga tidak perlu diukur atas dasar dari pertumbuhan PDRB secara merata, akan tetapi diperlukannya untuk melihat sejauh apa distribusi pendapatan tersebut yang telah diperoleh tersebar ke seluruh masyarakat.

Meningkatnya PDRB pada proses pertumbuhan ekonomi menjadi suatu keharusan dimana untuk menunjang keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, sehingga apabila PDRB mengalami kenaikan maka akan mencerminkan

kesejahteraan masyarakat. Namun, apabila dari proses pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan adanya kesempatan kerja yang memadai, maka dapat berdampak ketimpangan pendapatan serta penduduk miskin akan bertambah, dan kemiskinan pada akhirnya dapat merubah pola hidup di masyarakat dalam menyesuaikan pendapatan yang diperoleh.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam melihat keberhasilan pembangunan serta syarat untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Syarat yang diperlukan apabila hasil dari pertumbuhan ekonomi dapat menyebar pada setiap golongan masyarakat, terutama pada golongan penduduk miskin (Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2007).

Pada penelitian (Whisnu Adi Saputra, 2011), menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Kenaikan dari pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan kemiskinan. Hal tersebut berarti PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi daerah yang mempunyai hubungan negatif dengan kemiskinan. Sehingga diperlukannya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi guna menurunkan kemiskinan.

2. Hubungan Pendidikan dengan Kemiskinan

Keterkaitan kemiskinan dengan pendidikan sangat besar dimana pendidikan dapat memberikan kemampuan untuk dikembangkan melalui penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menumbuhkan akan kesadaran pentingnya martabat manusia. Mendidik serta memberikan ilmu pengetahuan berarti membantu untuk menggapai masa depan. Cara seperti ini

seharusnya dapat memberikan semangat untuk terus melakukan usaha dalam mencerdaskan bangsa (Criswardani Suryawati, 2005).

Pada sisi permintaan, terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pendidikan yaitu faktor pertama, apabila semakin tinggi tingkat pendidikan dari seseorang maka akan semakin tinggi juga pendapatan yang diperoleh. Faktor kedua, untuk biaya pendidikan yang dibebankan dan juga ditanggung oleh seorang peserta didik ataupun keluarganya. Sehingga untuk mendapatkan suatu kesempatan kerja dan berupah tinggi di era modern ini dibutuhkan juga seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi (Todaro, 2011).

Pada sisi penawaran, kuantitas dari pendidikan ditentukan pada proses politik dibandingkan dengan proses ekonomi. Karena begitu besarnya tekanan dari politik untuk sebagian dari negara berkembang dalam meningkatkan jumlah sekolah yang diharapkan mampu memberikan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sehingga kita dapat dengan mudahnya beransumsi bahwa dari sisi pengeluaran pemerintah menetapkan penawaran publik pada tingkat pendidikan yang dasarnya tingkat permintaan pribadi agregat mempengaruhi tingkat pendidikan (Todaro, 2011).

Pentingnya peran pendidikan dalam meningkatkan kemampuan terutama untuk negara berkembang dalam menyerap teknologi modern yang diperoleh dari negara maju serta mampu mengembangkan produktivitas hingga kapasitas supaya pembangunan yang berkelanjutan dapat diciptakan (Todaro, 2006). Pendidikan berhubungan dengan kemiskinan. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan

lebih tinggi akan memperoleh tingkat pendapatan yang lebih baik. Seseorang yang tingkat pendidikannya tinggi mempunyai peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Tingkat pendidikan dengan tingkat kemiskinan berbanding terbalik. Apabila seseorang mempunyai tingkat pendidikan yang baik maka kecil kemungkinan seseorang tersebut menjadi miskin dan begitupun sebaliknya. Salah satu sari karakteristik pendidikan yaitu kemampuan seseorang untuk dapat baca tulis dimana hal tersebut menunjukkan adanya indikator rata-rata lama sekolah.

Angka rata-rata lama sekolah tersebut menunjukkan seberapa banyak seseorang mendapatkan pendidikan dan seberapa tinggi pendidikan tiap individu. Jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang tersebut, maka pengetahuan dan keahliannya akan bertambah sehingga produktivitas yang dimiliki akan meningkat.

3. Hubungan Belanja Daerah dengan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dipengaruhi salah satu dari tingkat pendapatan rata-rata daerah tersebut. Apabila semakin tinggi tingkat pendapatan maka akan berpotensi dalam mengalokasikan anggaran untuk mengatasi masalah kemiskinan akan semakin besar. Akan tetapi dari alokasi tersebut harus tepat pada sasaran, apabila tidak maka akan mengakibatkan kemiskinan semakin buruk dan menghasilkan kekacauan sosial atau *social chaos* (Todaro, 2006).

Peran pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan sangat diperlukan, karena dengan peranan dari pemerintah seperti distribusi, stabilisasi dan alokasi. Beberapa peranan tersebut menjadi syarat yang perlu dipenuhi apabila tujuan dari

pembangunan yaitu berupa pengentasan kemiskinan ingin terpecahkan. Anggaran yang perlu dikeluarkan melalui belanja untuk mengatasi kemiskinan menjadi stimulus dengan menurunkan angka kemiskinan serta berbagai masalah pembangunan lainnya.

Pada penelitian (Hasibuan, 2005), menyatakan bahwa peranan dari anggaran untuk mengatasi kemiskinan. Penelitiannya menjelaskan anggaran pendapatan dengan jumlah orang miskin berpengaruh negatif. Jika semakin tinggi jumlah anggaran pendapatan maka dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Hal tersebut diartikan bahwa anggaran dialokasikan untuk membuat program mengatasi kemiskinan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

4. Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Kemiskinan

Dana Alokasi Umum yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013 pengalokasiannya melalui persentase tertentu dari pendapatan dalam Negeri neto yang sudah ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum (DAU) pada suatu daerah sudah ditetapkan melalui kriteria tertentu dimana menekankan aspek pemertaan serta keadilan yang selaras dengan adanya penyelenggaraan urusan dari Pemerintah serta perhitungan untuk DAU sudah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Paseki dkk (2014) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum dengan tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan dan negatif. Apabila semakin tinggi dana alokasi tersebut maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini membuktikan bahwa otonomi daerah yang bertujuan

sebagai pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat dapat mengurangi tingkat kemiskinan pada suatu daerah tertentu.

C. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Menurut (Dita, 2015) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah” penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel pengangguran, PDRB dan populasi berpengaruh secara signifikan. Artinya ketiga variabel tersebut mempengaruhi jumlah kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2008 sampai 2012. Sedangkan untuk variabel pendidikan (Angka Melek Huruf) tidak berpengaruh secara signifikan. Variabel PDRB memiliki pengaruh yang negatif, apabila PDRB mengalami kenaikan maka akan diikuti dengan adanya penurunan kemiskinan. Akan tetapi, kenaikan dari output akan mengakibatkan terserapnya tenaga kerja dengan besar tingkat erornya yaitu 0,05 ($\alpha = 5\%$). Pada variabel pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, apabila pengangguran mengalami kenaikan maka jumlah kemiskinan juga akan naik. Sedangkan untuk variabel populasi terhadap kemiskinan berpengaruh positif, apabila populasi tersebut bertambah maka mengakibatkan kemiskinan bertambah.
2. Pada penelitian (Asih, 2018) dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2002-2015” metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, sedangkan untuk variabel dependennya yaitu kemiskinan dan variabel independennya yaitu pendidikan,

kesehatan dan tingkat pengangguran. Menurut metode analisis deskriptif menyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan dan kemiskinan memiliki hubungan yang negatif, dimana setiap terdapat kenaikan pada tingkat pendidikan, angka kemiskinan mengalami penurunan serta rata-rata hubungan yang terjadi menunjukkan tanda negatif. Pada variabel tingkat kesehatan memiliki hubungan yang negatif terhadap kemiskinan, dimana setiap ada kenaikan pada tingkat kesehatan, angka kemiskinan mengalami penurunan serta rata-rata hubungan yang terjadi menunjukkan tanda negatif. Sedangkan untuk variabel tingkat pengangguran menunjukkan hubungan yang positif serta berpengaruh terhadap kemiskinan.

3. Menurut penelitian (Tutik, 2018) dengan judul “Analisis Tingkat Kemiskinan di kabupaten/Kota Kalimantan Timur Tahun 2008-2015” Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah secara parsial hanya variabel PDRB yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan probabilitas $< \alpha = 5\%$ ($0,0082 < 0,05$), sedangkan untuk variabel tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Secara simultan ketiga variabel independen yaitu PDRB, tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan dapat dilihat dengan nilai F hitung $> F$ tabel ($69,92015 > 2,81$) dengan nilai probabilitas sebesar 0,000000.
4. Pada penelitian (Atika, 2018) dengan judul “Pengaruh Pinjaman Daerah, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh

pinjaman daerah, pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data panel. Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa pinjaman daerah dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut ditunjukkan apabila peningkatan atau penurunan pinjaman daerah menjadi salah satu yang mempengaruhi kemiskinan, sedangkan pinjaman daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan pinjaman daerah menjadi salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

5. Penelitian (Rahmad, 2018) dengan judul “Dampak Perubahan Budaya Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan pada Masyarakat Desa Pahlawan” Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang relevan dalam mempengaruhi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat keluarga pesisir. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Berdasarkan metode analisis deskriptif dan analisis kuantitatif menyatakan bahwa variabel usia, jenis kelamin, pendidikan, dan status pekerjaan tidak memiliki hubungan yang koefisien dengan variabel dependen tingkat pendapatan, karena tingkat pendapatan lebih dipengaruhi oleh variabel keterampilan dan modal kerja. Sedangkan variabel usia, keterampilan, status pekerjaan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen kepemilikan asset. Hal tersebut bertolak belakang

dengan variabel jenis kelamin, pendidikan, dan modal kerja yang memiliki koefisien terhadap variabel dependen kepemilikan asset masyarakat desa Pahlawan.

6. Menurut penelitian (Novita, 2018) dengan judul penelitian “Determinan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2014” Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa variabel pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan taraf signifikansi 5%. Sedangkan untuk variabel pengeluaran pemerintah pada sektor pekerjaan umum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan taraf signifikansi 5%. Dalam koefisien determinasi R^2 sebesar 97% menyatakan bahwa variabel independen yang diteliti mampu menjelaskan pangeruhmya sebesar 97% terhadap variabel dependen.
7. Penelitian (Adepoju, 2018) dengan judul penelitian “*Determinants of Multidimensional Poverty Transitions Among Rural Households in Nigeria*” metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah model regresi logistik multinomial. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan multidimensi di antara rumah tangga perdesaan di Nigeria yaitu kritis sebesar 46,5%, sedangkan pendidikan dan rumah tangga, jumlah aset, dan kepemilikan tanah mempengaruhi kemiskinan sementara. Untuk status perkawinan, rumah tangga, kepemilikan tanah dan jumlah aset memepengaruhi kemiskinan yang bersifat kritis.

8. Menurut penelitian (Sweta, 2018) yang berjudul “*Dynamic Poverty Processes in Rural India and The Role of Livestock*” pada penelitian ini menjelaskan bahwa rumah tangga menjadi variabel dependen untuk mengurangi kemiskinan. Diharapkan bahwa jika memiliki sapi makan akan berpeluang 18% lebih besar untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Sedangkan untuk spesifikasi kedua memasukkan ukuran kelompok sebagai status kepemilikan sehingga ditemukan peluang sebesar 6,5% untuk mengurangi kemiskinan.
9. Penelitian (Ghanshyam, 2018) dengan judul penelitian “*Tackling Poverty and Inequality Among Farm Households in Bihar: Implications for Achieving Sustainable Development Goals (SDGs)*” Tujuan dari penelitian ini adalah SDGs menjadi salah satu tujuan utama untuk menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya dan dimana-mana. Model logit telah diterapkan untuk mengidentifikasi secara empiris dari faktor-faktor kemiskinan. Penelitian ini menganalisis hubungan antar kemiskinan dan rasio hutang, dan ketidaksetaraan antara rumah tangga pertanian di Bihar. Rasio hutang terhadap aset memiliki korelasi yang positif terhadap kemiskinan, akan tetapi tidak ditemukannya korelasi antara ketimpangan dan kemiskinan.
10. Menurut (Joshi, 2016) dalam penelitian yang berjudul “*Pathways to Improve Food Security and Reduce Poverty in Emerging India*” Tujuan dari penelitian ini yaitu pembangunan berkelanjutan. Terdapat dua tujuan dalam pembangunan berkelanjutan diantaranya (1) mengurangi kemiskinan dalam segala bentuknya dan (2) mengurangi kelaparan, meningkatkan pangan dan gizi, dan mempromosikan sektor pertanian. Didalam penelitian ini juga

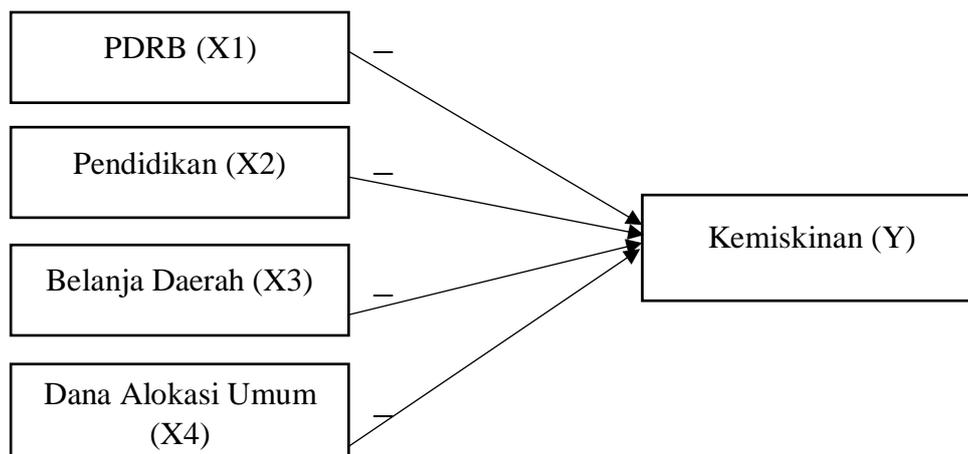
disampaikan mengenai kriteria untuk menentukan model apa pun dalam memastikan akses makanan yang secara efisien dan harga yang terjangkau bagi penduduk miskin.

D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Diduga variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2013 sampai 2017.
2. Diduga variabel Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2013 sampai 2017.
3. Diduga variabel Belanja Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2013 sampai 2017.
4. Diduga variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2013 sampai 2017.

E. Model Penelitian



Gambar 2. 3 Model Penelitian